

STUDI PERBANDINGAN PENCABUTAN IZIN TERTENTU SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP

Oleh
Henrico Munthe
NIM. 2005040014

Abstrak

Pencabutan izin tertentu sebagai pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merupakan pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam bentuk pencabutan izin usaha yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana melalui mekanisme pemidanaan yang bersifat preventif dan represif. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup bagaimana mekanisme pencabutan izin diterapkan secara adil, transparan, serta proporsional, dan sejauh mana efektivitasnya dalam penanggulangan kejahatan yang berdampak terhadap kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur bagi akademisi dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan menelaah regulasi nasional yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada kejelasan prosedur, prinsip *due process of law*, dan kebutuhan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan putusan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin sebagai pidana tambahan memiliki potensi sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif, namun implementasinya memerlukan kerangka hukum yang rinci, pengawasan yang kuat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulannya diperlukan regulasi pelaksana yang harmonis dan responsif menjadi prasyarat utama agar kebijakan ini berjalan optimal dalam sistem pemidanaan nasional.

Kata Kunci : Perbandingan, Pencabutan Izin Tertentu, Pidana Tambahan

**COMPARATIVE STUDY OF REVOCATION OF CERTAIN PERMITS AS
AN ADDITIONAL CRIMINAL PENALTY IN THE KUHP**

By

HENRICO MUNTHE

NIM. 2005040014

Abstract

The revocation of certain permits as an additional penalty in the new Criminal Code (KUHP), as stipulated in Law Number 1 of 2023, represents a significant reform in the Indonesian criminal justice system. This regulation is not only aimed at individuals but also includes corporate criminal liability, particularly in the form of revocation of business permits directly related to criminal acts. The main objective is to create a deterrent effect and prevent the recurrence of criminal acts through preventive and repressive punishment mechanisms. The main issues in this study include how the permit revocation mechanism is implemented fairly, transparently, and proportionally, and its effectiveness in addressing crimes that impact the public interest. The purpose of this study is to provide literature for academics and the general public. This study uses a normative legal method with a comparative legal approach to the old Criminal Code and examines relevant national regulations. This research focuses on procedural clarity, the principle of due process, and the need for inter-institutional coordination in the implementation of criminal decisions. The research findings indicate that permit revocation as an additional sanction has the potential to be an effective law enforcement instrument. However, its implementation requires a detailed legal framework, strong oversight, and human rights protections to prevent abuse of authority. In conclusion, harmonious and responsive implementing regulations are crucial for this policy to function optimally within the national correctional system.

Keywords: *Comparison, Revocation of Certain Permits, Additional Criminal Acts*